

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suku Rohingya merupakan kelompok etnis beragama Islam Sunni yang berasal dari Rakhine atau yang dahulu dikenal sebagai Arakan. Namun, narasi dominan yang dipercaya oleh masyarakat bahkan pemerintah terhadap suku Rohingya sebagai pencari suaka Bengali ilegal yang datang ke Myanmar (Ferrie, 2013). Pada tahun 1978, pemerintah Myanmar dan Kelompok Budhis Nasionalis berusaha mengusir “orang asing” atau suku Rohingya dengan melakukan kekerasan fisik dan genosida (Ferrie, 2013). Sekitar 200,000 orang suku Rohingya harus melewati batas negara dan bermigrasi ke Bangladesh; kondisi ini merupakan gelombang pertama pergerakan pencari suaka suku Rohingya (Ullah, 2011) hingga menjadi isu internasional.

Pada pertengahan Mei 2015, Indonesia dikejutkan dengan masuknya kapal-kapal asing di perairan Aceh, Indonesia. Kapal-kapal tersebut berisi para pencari suaka Rohingya dengan kondisi buruk akibat telah berada di laut selama berhari-hari (Human Rights Watch, 2015). Para pencari suaka kabur akibat konflik negara yang mengancam keberlangsungan hidup mereka di Myanmar. Namun, Indonesia menolak kedatangan kapal-kapal tersebut untuk bersandar karena dianggap sebagai sebuah ancaman kepentingan dan kedaulatan negara (Moy & Kusuma, 2016). Indonesia pun segera memperketat keamanan negara dengan mendatangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berjaga di sekitar daerah perbatasan negara sekitar Aceh.

Pada tanggal 20 Mei 2015, Malaysia menyelenggarakan sebuah pertemuan *Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia* Bersama Indonesia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi akibat masuknya 1600 lebih pencari suaka ilegal pada tanggal 10 Mei 2015 lalu (DW, 2015). Direktur keamanan internasional dan pelucutan senjata Kementerian Luar Negeri (KEMLU), Andi Rachmianto mengatakan bahwa kehadiran para pencari suaka yang secara ilegal masuk tersebut berpotensi mengganggu stabilitas negara-negara di Kawasan Asia dan pasifik (Benarfa, 2015). Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi penting untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan isu ini.

Yang menarik, Pasca pertemuan tersebut Indonesia melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya. Dari yang semula menolak pencari suaka Rohingya, tetapi setelah pertemuan tersebut Indonesia memutuskan menerimanya. Keputusan ini dinyatakan dalam konferensi pers pasca *Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia* oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi (Pasuhuk, 2015). Dalam konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia bersama menyatakan untuk menerima pencari suaka dan berkomitmen untuk menyediakan tempat pencari suaka sementara bagi pencari suaka.

Perubahan kebijakan tersebut juga turut dikonfirmasi benar oleh Presiden Joko Widodo melalui wawancara yang dirilis oleh *Voice of America (VOA)* Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 (Satriawan, 2015). Tidak hanya itu, media publikasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), *Masyarakat ASEAN*, juga turut

menjelaskan lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang dipublikasikan pada bulan Juni 2015. Dalam Publikasi tersebut, laporan utamanya membahas mengenai hasil *ministerial meeting* dengan judul *Rohingya, Antara Solidaritas Asean dan Kemanusiaan*. Kemlu menyatakan bahwa ketiga menteri menyepakati isu pencari suaka Rohingya ini telah naik menjadi isu regional.

Meskipun adanya prinsip *non-interference*, Kemlu mengapresiasi atas kebijakan baru yang ditetapkan oleh Indonesia dengan menerima pencari suaka Rohingya (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2015). Apresiasi lainnya pun disampaikan juga oleh PBB melalui UNHCR (UNHCR, 2015). Sebab terjadi perubahan politik luar negeri yang signifikan, maka pengaruh dibalik pengubahan politik luar negeri Indonesia dalam kasus ini patut diteliti.

Pada penelitian terdahulu berjudul “Latar Belakang Indonesia Menerima Pencari suaka Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)” yang dilakukan oleh Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma (2016) yang menemukan bahwa penerimaan pencari suaka Rohingya karena adanya kesamaan identitas, yaitu beragama muslim dan menjunjung tinggi norma HAM. Namun, penelitian ini hanya bersifat secara umum dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan konsep pencari suaka untuk memperkuat argumen penelitiannya (Moy & Kusuma, 2016).

Penelitian lainnya mengenai “Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pencari suaka Rohingya di Indonesia” oleh Tirza Listiarani (2020). Penelitian ini membahas mengenai peristiwa setelah kesepakatan di tahun 2015. Kondisinya ialah Indonesia menjadi negara satu-satunya yang tetap mempertahankan kebijakan sebagai negara suaka sementara dan kedua negara

lainnya, Thailand dan Malaysia, telah berhenti menerima pencari suaka Rohingya. Penelitian ini membahas mengenai alasan kebijakan luar negeri Indonesia dengan menggunakan konsep keamanan manusiawi serta faktor determinan eksternal dan internal dari kebijakan luar negeri (Listiarani, 2020).

Setelah meninjau penelitian sebelumnya, penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis berbeda. Penulis akan melakukan penelitian dengan menekankan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pencari suaka Rohingya pada tahun 2015 dengan menggunakan konsep *foreign policy change* oleh Eidenfalk.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang didapat adalah Mengapa Indonesia mengubah kebijakannya dalam kasus kedatangan pencari suaka etnis Rohingya pada tahun 2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus kedatangan para pencari suaka etnis Rohingya pada tahun 2015.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Foreign Policy Change**

*Foreign Policy Change* merupakan sebuah teori yang menjelaskan secara terstruktur mengenai proses perubahan suatu kebijakan luar negeri terhadap isu internasional (Eidenfalk, 2006). Dibandingkan beberapa model teoritis terdahulu, Eidenfalk menggabungkan teori-teori terkait dengan kebijakan luar negeri untuk mendapatkan model baru yang dapat menjelaskan prosesnya secara komprehensif. Oleh karena itu, *Foreign Policy Change* berisi beberapa bagian yang tidak dijelaskan lebih lanjut dari model terdahulu.

Beberapa bagian ini diantaranya seperti *sources of change* yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengaruh domestik yang di dalamnya terdapat indikator media dan opini publik, serta indikator global dan regional dalam pengaruh internasional. Dari *sources of change*, *foreign policy-maker(s)* menjadikannya sebuah pertimbangan dalam perubahan kebijakan luar negerinya.

#### **1.4.1.1 Faktor Pengaruh Domestik**

Faktor pengaruh domestik merupakan bagian dari *sources of change* dalam teori *foreign policy change*. Eidenfalk menjelaskan bahwa bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari teori *two-level game* yang dirumuskan oleh Robert D. Putnam. Dalam teori *two-level game*, Robert D. Putnam berpendapat bahwa politik domestik terkadang dapat mempengaruhi politik internasional dan sebaliknya (Putnam, 1988; (Eidenfalk, 2006). Hal ini dapat diketahui dari tekanan yang datang melalui politik dalam negeri dan politik internasional terhadap pemerintah negara tersebut (Eidenfalk, 2006). Pertimbangan atas faktor domestik menjadi sangat

penting karena faktor ini memberikan dukungan atau bahkan dapat menggulingkan kuasa dari pengambil kebijakan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri secara domestik, yaitu birokrasi, media, kelompok kepentingan, opini publik dan partai politik.

#### **1.4.1.2 Birokrasi**

Birokrasi telah dipandang sebagai sumber dari stabilitas dibandingkan hanya sebuah sumber perubahan sejak dahulu. Hal ini dikarenakan birokrasi yang mengatur mengenai prosedur standar pada sistem pemerintahan. Namun, birokrasi inilah yang mempersulit proses perubahan kebijakan yang hendak ditetapkan oleh suatu negara. Kesulitan ini datang dari banyak birokrat memilih untuk bisa mempertahankan *status quo*-nya dan selebihnya memilih untuk mengadvokasi perubahan. Tidak mudah bagi birokrat yang memilih perubahan, sebab seorang birokrat memiliki batasan. Mereka perlu mempertimbangkan dengan hati-hati terhadap apa yang diperjuangkan tersebut (Halperin didalam Joakim Eidenfalk)

#### **1.4.1.3 Opini Publik**

Opini publik merupakan sebuah tanggapan, pemahaman atau bahkan kepercayaan dari mayoritas masyarakat terhadap isu tertentu terkait birokrasi yang dijalankan pemerintah. Opini publik menjadi penting karena pemerintah memerlukan dukungan untuk dapat menjalankan kebijakannya sekaligus memastikan bahwa legitimasi publik tetap ada saat pemilihan kembali. Namun, jika publik tidak merasa puas terhadap kebijakan tertentu maka hal itu bisa menghasilkan adanya pemberontakan yang akan menekan pemerintah untuk akhirnya mengubah kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2006).

#### **1.4.1.4 Media**

Media memiliki pengaruh penting dalam perubahan kebijakan karena media menjadi penghubung informasi antara publik dan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan peran media untuk bisa mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang disahkannya. Peran penting media dapat dilihat dari beberapa tujuan yang memberikan pengaruh terjadinya perubahan kebijakan luar negeri, yaitu media menjadi pembentuk opini publik karena media memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah yang kemudian menjadi sebuah opini. Media mengambil peran sebagai penyelidik yang memberikan informasi kepada pemerintah dan publik sehingga terjadi perubahan kebijakan luar negeri. Media menjadi forum bagi para aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk menekan atau meningkatkan legitimasi terhadap kebijakan tertentu (Eidenfalk, 2006). Oleh karena itu, pengaruh yang diberikan oleh media ini dapat mendorong dukungan publik ataupun menjatuhkan pemerintah kondisinya peran media memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah dalam proses pengambilan kebijakannya.

#### **1.4.1.5 Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan adalah suatu perkumpulan yang terorganisir, memiliki tujuan, dan aktif dalam kegiatan terkait aktivitas pemerintahan. Kelompok kepentingan memiliki pengaruh yang terus meningkat beberapa dekade terakhir. Kelompok kepentingan hanya berfokus pada isu-isu tunggal yang menarik perhatian publik dan kemudian menyebabkan pemerintah perlu menanggapi isu

tersebut secara lebih serius. Jika tidak, pemerintah bisa kehilangan posisi atau kepentingannya sebagai pembuat kebijakan.

#### **1.4.1.6 Partai Politik**

Partai politik yang dimaksudkan ialah partai politik yang berada di parlemen, khususnya partai politik yang dukungannya diperlukan oleh pemerintah dalam pengambilan atau perubahan kebijakannya. Pada penjelasan sebelumnya, birokrat atau dalam hal ini pemerintah memiliki batasan, salah satunya ialah terkait dukungan dalam parlemen. Pemerintah mengandalkan dukungan partai politik sebagai pertimbangan dalam merumuskan hingga mengesahkan suatu kebijakan.

#### **1.4.2.1 Faktor Pengaruh Internasional**

Politik dalam isu internasional merupakan kerangka kompleks yang melibatkan negara, institusi, dan entitas non-negara yang terlibat dalam interaksi di berbagai tingkatan. Ketika menganalisis bagaimana faktor-faktor internasional mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya para aktornya tetapi juga elemen-elemen seperti kekuasaan, norma, dan institusi. Penjelasan lebih lanjut dibagi menjadi 4 bagian yaitu faktor global, faktor regional, aktor non-negara, dan hubungan bilateral.

#### **1.4.2.2 Faktor Global**

Faktor global fokus pada perubahan dalam sistem politik internasional yang memberi dampak dan mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebuah peristiwa atau aktor terkait dapat memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negerinya. Pengaruh dari sebuah peristiwa menjadi sangat penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem politik internasional, institusi



secara internasional dan hingga mengubah norma internasional. Contohnya seperti peristiwa 11/9 yang menyebabkan Amerika Serikat memulai “*War on Terror*” dan mempengaruhi sistem politik dari banyak negara hingga hari ini. Oleh karena itu, faktor global termasuk ke dalam bagian faktor pengaruh internasional.

#### **1.4.2.3 Faktor Regional**

Dampak dari suatu peristiwa tidak hanya berdampak secara global, tetapi juga secara regional. Para aktor dalam tingkatan regional, seperti institusi regional, memiliki pengaruh penting pada penetapan kebijakan luar negeri. Setiap negara memiliki perbedaan aturan dan perbedaan ini terbentuk dari budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan suatu negara harus menerima peraturan yang telah ditetapkan dari negara tertentu. Perbedaan aturan itu juga berpengaruh terhadap pertimbangan bagi para aktor saat hendak melakukan penetapan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, faktor regional ini tidak dapat berjalan sendiri dan masuk menjadi bagian dari *Foreign Policy Change*.

#### **1.4.2.4 Hubungan Bilateral**

Pada faktor ini akan berkaitan dengan keberlangsungan hubungan bilateral suatu negara dengan para aktor terkait. Namun, hubungan yang dimaksudkan tidak hanya mengenai antarnegara, melainkan juga termasuk secara global dan regional. Para aktor, seperti negara dan institusi internasional, bisa mempengaruhi negara lainnya dengan menggunakan pemicu, seperti aliansi militer atau ancaman ekonomi, untuk menekan pihak lainnya untuk mengadopsi atau menyesuaikan kebijakan luar negerinya.

#### **1.4.2.5 Aktor non-Negara**

Aktor non-negara merupakan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh untuk dapat mempengaruhi keputusan dari aktor negara, tetapi tidak berkaitan dengan negara tersebut. Aktor non-negara dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu *Sub-state actors*, seperti Perusahaan atau industri yang ada di wilayah tersebut. *Inter-Governmental Organization* yaitu kelompok yang tergabung dan didirikan melalui perjanjian. *Trans-national actors* yaitu individu atau kelompok yang posisinya dibawah negara tetapi berada di negara lain, seperti pencari suaka dan pencari suaka.

*Violent Political Groups* yaitu kelompok yang berniat menyebarkan kekerasan dan mempengaruhi tindakan negara seperti kelompok teroris, Terakhir, ada *Criminal Groups* yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas kriminal dan illegal untuk mencari keuntungan secara material (Pearlman, Wendy; Cunnigham, Kathleen Gallagher, 2011). Aktor non-negara menjadi bagian penting akibat pengaruh yang diberikan dapat mempengaruhi kondisi suatu negara. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pengaruh dari aktor non-negara dalam kebijakan luar negerinya.

#### **1.4.3 Windows of Opportunity**

Dalam prosesnya, kebijakan luar negeri tidak hanya sekedar berubah akibat *sources of changes* tetapi juga aktor yang berperan sebagai *the key decision-makers* dan persepsinya perihal isu tersebut. *Windows of Opportunity* merupakan suatu peluang yang dijadikan sebagai momentum perubahan kebijakan luar negeri oleh para aktor terkait untuk merubah kebijakannya. Pada bagian ini, para aktor melihat

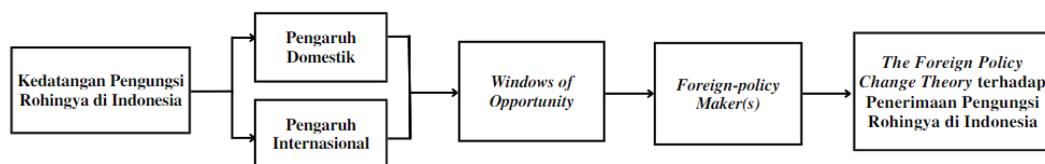
*policy window* dari isu tersebut, atau tekanan yang diberikan dari *sources of change*, atau bahkan menyadari secara pribadi melalui persepsinya bahwa terdapat peluang untuk mengubah kebijakan melalui agenda politik tertentu. Menurut Margaret D. Hermann dalam artikel Eidenfalk, ada beberapa persepsi pada *policy decision-maker(s)* diantaranya,

1. Keyakinan (*Beliefs*) merupakan persepsi mendasar yang diyakini dan mempengaruhi interpretasi aktor dalam melihat isu tertentu. Sikap ini mempengaruhi strategi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh aktornya.
2. Motif (*Motives*) merupakan alasan yang melatarbelakangi sikap para aktor terhadap isu tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan menjaga kekuasaan, beraliansi, dan kepentingan akan persetujuan.
3. Gaya Keputusan (*Decision Style*) merujuk pada gaya atau metode yang lebih dipertimbangkan oleh para aktor. Contohnya seperti seberapa dalam para aktor terbuka akan informasi atau seberapa tinggi risiko yang hendak diambil terkait isu tersebut.
4. Minat dalam Urusan Luar Negeri (*Interest in Foreign Affairs*) mengacu pada kepentingan pemimpin sekaligus mempengaruhi besarnya partisipasi pemimpin dalam aktivitas dunia internasional. Jika dia memiliki sedikit minat pada isu tersebut, aktor tersebut kemungkinan akan mendelegasikan wewenang kepada orang lain, seperti menteri luar negeri. Jika, aktif aktor itu akan mempunyai minat yang besar terhadap urusan luar negeri hingga aktif berkonsultasi mengenai keputusan dan terus mendapat informasi

tentang apa yang terjadi dalam urusan luar negeri. Kemudian akan mengambil alih pembuatan kebijakan luar negeri daripada membiarkan pihak lain menanganinya. Keempat persepsi ini dapat mempengaruhi cara seorang pemimpin memandang kebijakannya dalam menghasilkan *windows of opportunity* itu.

### 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Bagan Sintesa Pemikiran



*Sumber: Penulis*

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, penulis menggunakan teori *Foreign Policy Change* yang dirumuskan oleh Eidenfalk untuk menjelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri oleh suatu negara untuk merespon isu internasional. Dalam teori *Foreign Policy Change*, Eidenfalk menjelaskan bahwa ada sumber perubahan atau *sources of change* yang mempengaruhi pengambilan kebijakan ini, yaitu faktor perubahan dari pengaruh domestik (*domestic factors of change*) dan faktor perubahan dari pengaruh internasional (*international factors of change*).

Kedua faktor ini memiliki indikator-indikator yang digunakan untuk membuktikan bahwa respon domestik dan internasional terhadap suatu isu dapat mempengaruhi *foreign policy maker(s)* atau pengambil kebijakan luar negeri dalam memutuskan kebijakannya. Pada penelitian, Indonesia sebagai *foreign policy-*

*maker* memutuskan untuk tidak mengizinkan masuk kedatangan pencari suaka Rohingya tetapi kebijakan itu berubah akibat reaksi berbagai pihak dari dalam dan luar negeri. Reaksi ini memiliki pengaruh yang akhirnya mendorong adanya *window of opportunity*.

## **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan sintesa pemikiran yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat merumuskan argumen utama bahwa terdapat faktor pengaruh domestik dan internasional dalam proses perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kedatangan gelombang pencari suaka etnis Rohingya di tahun 2015. Indonesia mendapatkan tekanan tersebut akibat kebijakan awal yang menolak kedatangan gelombang pencari suaka Rohingya ilegal ini. Secara domestik, masyarakat Indonesia melakukan beberapa aksi yang ditunjukkan kepada pemerintah, portal berita membuat beberapa artikel untuk terus mengupdate kondisi dari pencari suaka dan pergerakan pemerintah selama masa penolakan tersebut. Secara internasional, Indonesia menerima tekanan diantaranya datang dari UN *High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), *International Organization for Migration* (IOM), serta UN *High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk bisa segera menyelamatkan pencari suaka Rohingya yang sudah berhari-hari berada di lautan. Keterkaitan pengaruh Domestik dan Internasional ini terlihat dari usaha yang dilakukan untuk meminta negara Indonesia segera menyelamatkan para pencari suaka atas nama kemanusiaan. Lalu, Indonesia menjadikan Pertemuan dengan Malaysia dan Thailand sebagai *windows of opportunity* dalam perubahan kebijakannya yang

akhirnya menerima pencari suaka Rohingya sebagai negara suaka sementara sesuai *joint statement* tersebut.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif. Hal ini dikarenakan penulis akan melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara dua fenomena atau lebih di dalam penelitian mengenai fenomena kedatangan para pencari suaka Rohingya pada tahun 2015 dan sikap yang diputuskan oleh Indonesia terhadap para pencari suaka Rohingya untuk menemukan apakah hubungan sebab-akibat yang terjadi antar variabel terbukti benar atau bahkan bertentangan.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi oleh pengambilan waktu pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan rangkaian dari peristiwa di dalam penelitian ini; dimulai dari kedatangan para pencari suaka etnis Rohingya, kemudian penolakan oleh Indonesia hingga perubahan kebijakan untuk menerima pencari suaka Rohingya terjadi pada tahun tersebut. Kemudian, penulis hanya akan membahas perubahan kebijakan Indonesia terhadap pencari suaka etnis Rohingya yang dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional serta keterkaitan kedua faktor sesuai dengan teori *Foreign Policy Change* setelah menandatangani *Joint Statement Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asian* di tahun yang sama.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data dan sumber penelitian sekunder berupa

buku, jurnal, surat kabar, laporan, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bagian analisis sumber perubahan media, penulis memilih untuk melakukan analisis dengan media online. Hal ini dikarenakan tahun dari krisis ini yang sudah terlampau lama sehingga cukup sulit dilakukan jika menggunakan media cetak, maka penulis memilih untuk dapat melakukannya melalui media online.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kualitatif. Teknik ini digunakan karena peristiwa yang diteliti memiliki banyak data dengan penjelasan melalui pengamatan yang berisi uraian mengenai situasi yang terjadi, interaksi, dan tingkah laku dari objek yang diamati di lapangan. Analisa dengan pendekatan kualitatif ini akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menjelaskan hasil penelitian dengan analisis yang lebih terperinci dengan teori yang ada

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara terarah dengan pembagian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang akan memaparkan pendahuluan penelitian yang mencakup bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran dan divisualisasikan dengan bagan. Kemudian, ada argumen utama dan metodologi penelitian terkait proses pengambilan kebijakan terhadap isu yang akan diteliti oleh penulis.

Bab II merupakan bab yang akan menjelaskan terkait pengaruh dari faktor domestik atas perubahan kebijakan Indonesia terhadap pencari suaka Rohingya di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang akan menjelaskan terkait pengaruh dari faktor internasional dan keterkaitannya dengan faktor domestik yang memberikan pengaruh atas perubahan kebijakan Indonesia.

Bab IV berisikan mengenai momentum *window of opportunity* perubahan kebijakan Indonesia terkait pencari suaka etnis Rohingya

Bab V Pada bab ini berisi penutup penelitian yang dapat berupa kesimpulan serta berisi kritik dan saran dari penulis terkait dengan penelitian ini.